

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang optimal memaksa sekolah melakukan proses manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Proses manajemen keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang baik pula. *Stakeholder* yang baik berupa pihak-pihak internal maupun eksternal sekolah yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keaktifan *stakeholder* akan menunjang proses pengelolaan keuangan sekolah yang akan berpengaruh pada jumlah uang yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan sekolah, sedangkan jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumberdaya lain, seperti kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya (Dzulfikar, 2015:2).

UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 (1) yang menyatakan, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pelayanan minimal dengan prinsip pengelolaan berbasis sekolah/madrasah” dan pasal 48 (1) yang menyatakan “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Prinsip keadilan artinya besarnya biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sekolah. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran dengan hasil yang dapat dilihat dari sudut penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan dan hasil. Transparansi artinya adanya keterbukaan dalam pengelolaan biaya pendidikan atau keterbukaan sumber pendapatan dan jumlah, rincian penggunaannya dan pertanggung jawabannya jelas sehingga memudahkan berbagai pihak untuk mengetahuinya. Akuntabilitas publik

merupakan penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah atau sesuai dengan rencana sekolah.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berlangsungnya era globalisasi dimana ada beberapa tantangan yang aris dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan menjadi hal yang terpenting untuk bangsa ini. Pelayanan dan penyediaan pendidikan, menjadi persaingan antar sekolah swasta dan negeri. Persaingan ini seringkali tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sekolah yang bersangkutan, baik pengajar, sarana dan prasarana maupun tingkat kelulusan sekolah itu sendiri. Terbatasnya alokasi dana dari pemerintah merupakan suatu kendala yang membuat kualitas pendidikan sekolah belum juga meningkat. Namun dalam hal ini tidak menjadikan tolak ukur atas kualitas suatu sekolah, terlebih lagi jika dikaitkan dengan keberhasilan sekolah dalam menghasilkan lulusan. Sekolah harus menggunakan dana dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk meningkatkan akan pelayanan dan kualitas sekolah. Apabila dana pemerintah tidak mencukupi maka sekolah bisa mengupayakan dengan melalui dana dari masyarakat (Sari: 2012).

Untuk memiliki kualitas pendidikan dalam standar pengelolaan pendidikan diharapkan memiliki system perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus didalam sekolah. Sekolah dalam perencanaan program merumuskan dan menetapkan visi dan misi dalam meningkatkan tujuan program dalam perencanaan kerja sekolah (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program-program pendidikan nasional perlu beberapa hal sebagai pendukung yaitu: 1) strategi pendanaan pendidikan, 2) system koordinasi, tata kelola dan pengawasan internal, 3) system pemantauan dan

evaluasi dan 4) system dan teknologi informasi terpadu. Dalam hal ini peneliti akan mengulas lebih mendalam tentang penerapan program pendidikan nasional tentang strategi pendanaan pendidikan.

Computer based information system, yang terdiri dari system informasi akuntansi dan standar akuntansi Indonesia, khususnya standar akuntansi pendidikan serta sistem informasi manajemen sekolah yang mempunyai fungsi sebagai sarana penyaji informasi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan serta laporan keuangan sekolah berupa laporan neraca dan laporan *surplus deficit*. Disamping itu penyaji informasi administrasi sekolah, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang membantu ketika akan di audit oleh akuntan publik dengan hasil yang wajar tanpa pengecualian (Pemendiknas No 78 tahun 2009 tentang SBI pada Pasal 14).

Setiap sekolah harus menyajikan informasi biaya investasi, biaya operasional dan laporan keuangan yang baik, maka sekolah harus menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sangat berhubungan langsung dengan penyajian informasi dan administrasi sekolah. RKAS ini memiliki sumber dana yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, bantuan dari pusat atau pemerintah dan komite sekolah. Sehingga pada waktu rencana kegiatan dan anggaran sekolah perlu dilakukan. Sekolah melakukan realisasi anggaran keuangan sekolah dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana nilai perubahan dengan anggaran keuangan sekolah melihat dari system pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan *Computer Based Infomasion system* dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah di SM Al-Firdaus Sukohajo Tahun Ajaran 2017/2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana system dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah dengan menggunakan *computer based infomasion system* di SM Al-Firdaus Sukoharjo tahun ajaran 2017/2018?
2. Bagaimana tanggapan *stakeholder* mengenai pengelolaan keuangan sekolah dengan menggunakan *computer based infomasion system*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana system dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah dengan menggunakan *computer based infomasion system* di SM Al-Firdaus Sukoharjo tahun ajaran 2017/2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan *stakeholder* mengenai pengelolaan keuangan sekolah dengan menggunakan *computer based infomasion system*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan penggunaan *Computer Based Infomasion system* dalam pengelolaan keuangan sekolah.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai landasan untuk pengadaaan penelitian lebih lanjut lagi.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan masukan pada SM Al-Firdaus Sukoharjo, khususnya tentang penerapan *Computer Based Infomasion system* dalam pengelolaan keuangan sekolah.